

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih banyak sekali elemen perkotaan yang harus dikembangkan, salah satunya adalah permukiman. Permukiman yang ada di Indonesia saat ini menjadi salah satu permasalahan yang sangat mendesak. Permasalahan permukiman merupakan permasalahan yang paralel, permasalahan yang saling merambat dan terkoneksi satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kebutuhan masyarakat Indonesia akan tempat tinggal.

Menurut (Indah, 2024) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk membiayai program-program yang bertujuan menangani permukiman kumuh. Dalam hal ini, komunitas lokal atau masyarakat setempat memiliki peran penting untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahap program, mulai dari proses identifikasi masalah hingga evaluasi hasil. Partisipasi ini mencakup keikutsertaan dalam rapat-rapat, memberikan saran, serta terlibat dalam kegiatan di lapangan. Selain itu, mereka juga mengorganisir diri melalui kelompok-kelompok komunitas untuk meningkatkan kapasitas diri dalam berbagai aspek.

Menurut Kurniawan (2022) Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada perkampungan kumuh di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan permukiman kumuh di kota-kota Indonesia masih terus mengalami peningkatan antara tahun 2017 hingga 2019, dengan angka kenaikan mencapai 13,86%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta belum

maksimalnya peran lembaga keamanan dalam menangani masalah sosial, termasuk tingginya tingkat kriminalitas di kawasan kumuh. Selain itu, banyak rumah tangga di permukiman kumuh yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang layak serta fasilitas sanitasi yang memadai. Pembangunan sistem drainase juga masih jauh dari standar kehidupan yang layak di perkotaan, karena pengelolaan air yang belum memadai.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di pemukiman kumuh, di mana banyak warga hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi fisik bangunan mencerminkan keadaan lingkungan, dan sarana serta prasarana di Dabo Lama juga masih kurang memadai. Kawasan kumuh sering dianggap sebagai wilayah marginal yang menghambat pertumbuhan kota yang lebih berfokus pada sektor ekonomi. Lingkungan permukiman yang buruk, dengan pelayanan yang minim seperti air bersih, drainase, dan pengelolaan limbah, memperburuk masalah kepadatan dan ketidakteraturan yang berimbas pada fisik bangunan dan meningkatnya kriminalitas.

Dalam konteks pemanfaatan ruang, pemukiman kumuh didefinisikan sebagai area tidak layak huni, dengan bangunan yang tidak teratur dan kepadatan tinggi, serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sering kali, penggunaan ruang tersebut tidak sesuai dengan fungsinya, seperti terbentuknya kantung-kantung pemukiman di area yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau. Hal ini menunjukkan bahwa penghuni tidak mampu membeli atau menyewa rumah di daerah perkotaan dengan harga tinggi, sementara lahan kosong semakin berkurang. Dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, kondisi rumah

yang buruk dan kepadatan tinggi menimbulkan ancaman terhadap kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan warga.

Kabupaten Lingga terdiri dari 10 kecamatan, termasuk Kecamatan Singkep, yang memiliki enam kelurahan/desa. Dari enam tersebut, tiga di antaranya teridentifikasi sebagai kawasan kumuh, yaitu Kelurahan Dabo, Kelurahan Dabo Lama, dan Desa Batu Berdaun. Di Kelurahan Dabo Lama, terdapat dua kawasan pemukiman yang pertama kawasan kumuh yang terletak di sekitar area bekas tambang timah seluas 26,56 hektar, yang termasuk dalam kategori kumuh sedang.

Pada masa lalu, Kabupaten Lingga dikenal sebagai penghasil timah, terutama di pulau Singkep, dengan aktivitas penambangan yang berlangsung hampir dua abad (1812-1992). Setelah PT Timah menghentikan operasinya, lokasi penambangan meninggalkan banyak lubang terbuka yang tidak ditutup, mengakibatkan penumpukan air dan terbentuknya kolong. Selain itu, yang kedua bukan hanya bekas tambang timah saja yang menjadi kawasan kumuh, di daerah bagian pesisir nya juga telah tercemar akibat sampah-sampah yang berserakan. Daerah pesisir ini juga sering terjadi banjir yang menjadi langganan tiap tahun nya. Kawasan pesisir sering menjadi tempat tinggal bagi masyarakat nelayan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Rumah-rumah dibangun secara tidak teratur dan seringkali tidak memenuhi standar kesehatan.

Kawasan pesisir cenderung rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan abrasi pantai. Sedikitnya untuk data sementara dari Lurah Dabo Lama terdapat 124 Kartu Keluarga (KK) di daerah tersebut terpaksa menghadapi dampak

banjir susulan yang menggenangi rumah mereka. Lokasi sebagian di RT.1 dan RT.2 RW.4,serta di wilayah RT.1 RW.9 hampir 75 persen,serta sebagian RT.2 RW.9 yang terdampak banjir tersebut.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga memfokuskan pada tahun 2023 akan menuntaskan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Lingga. Pada tahun 2022 Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perkim Kabupaten Lingga pernah mengatakan bahwa pada tahun 2023 akan menuntaskan kawasan kumuh di Dabo Lama seperti di kawasan kumuh di Desa Marok Tua yang pernah ditangani sebelumnya. Desa Marok Tua pernah mendapatkan Dana Alokasi khusus untuk memperbaiki jalan dan pelantar, sementara Kelurahan Dabo Lama juga sama hanya menggunakan dana APBN dengan nilai Rp36 miliar.

Dengan mempertimbangkan karakteristik penghuni, hunian, dan sarana prasarana, kondisi tersebut menunjukkan potensi pemukiman yang tidak terencana dan tidak tertata. Dabo Lama, sebagai pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten Lingga, telah menyaksikan peningkatan jumlah penduduk yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam konteks ini, munculnya pemukiman kumuh menjadi isu yang sangat penting untuk ditangani. Peningkatan jumlah penduduk di Dabo Lama berhubungan langsung dengan kebutuhan infrastruktur dasar yang semakin meningkat. Namun, ketersediaan infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan sanitasi sering kali tidak memadai. Data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menunjukkan bahwa sekitar 40% penduduk kawasan ini tinggal dalam kondisi yang tidak layak.

Kondisi pemukiman kumuh di Dabo Lama ditandai oleh kualitas lingkungan yang buruk. Banyak rumah dibangun secara informal dan tidak memenuhi standar kesehatan, sehingga menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat. Survei lapangan menunjukkan bahwa banyak rumah tidak memiliki akses ke sanitasi yang memadai, yang berimbas pada peningkatan penyakit menular. Ketersediaan air bersih juga menjadi masalah serius. Banyak penduduk terpaksa bergantung pada sumber air yang tidak terjamin kualitasnya. Hal ini meningkatkan risiko penyakit, terutama di kalangan anak-anak dan orang tua. Data menunjukkan bahwa tingkat kejadian diare di kawasan kumuh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Kabupaten Lingga. Kondisi ekonomi masyarakat di Dabo Lama juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan permukiman kumuh. Banyak penduduk bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil. Keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak membuat mereka terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya ketidakpastian ekonomi bagi keluarga di kawasan tersebut.

Secara normatif, permasalahan pemukiman kumuh di Dabo Lama bertentangan dengan berbagai regulasi yang ada. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan pentingnya penyediaan hunian yang layak bagi semua warga. Namun, implementasi regulasi ini sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 21 Ayat 3 tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 - 2042 yang mengatur tentang Rencana

Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman masih banyak program yang diusulkan akan tetapi masih tidak berjalan efektif karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Kondisi lingkungan yang buruk di Dabo Lama menciptakan tantangan serius bagi pemerintah daerah. Tanpa upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, masalah pemukiman kumuh akan terus berlanjut. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai permasalahan ini untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif.

Penanganan pemukiman kumuh tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan ekonomi. Program-program yang difokuskan pada peningkatan keterampilan dan pendidikan masyarakat harus menjadi prioritas. Dengan memberikan pelatihan keterampilan yang relevan, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan keluar dari jeratan kemiskinan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sangat penting dalam penanganan masalah ini. Kerjasama ini dapat menciptakan sinergi yang positif dan mendukung implementasi program yang lebih efektif. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan juga sangat diperlukan. Pendidikan adalah kunci untuk memutus siklus kemiskinan di kawasan kumuh. Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, generasi mendatang di Dabo Lama dapat memiliki peluang yang lebih baik. Pengumpulan dan analisis data yang akurat mengenai kondisi pemukiman kumuh akan

membantu pemerintah memahami masalah yang ada secara lebih mendalam. Dengan informasi yang tepat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program penanganan pemukiman kumuh. Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan akan menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya perbaikan. Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini mengambil judul "Analisis Permasalahan Permukiman Kumuh Di Kawasan Dabo Lama Kabupaten Lingga".

1.2 Rumusan Masalah

Mengidentifikasi rumusan masalah agar mempermudah proses penelitian dan dapat menjadi pedoman bagi tujuan dan manfaat yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan dan program yang telah diterapkan untuk mengatasi pemukiman kumuh, di Kelurahan Dabo Lama Kabupaten Lingga?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan permukiman kumuh di Kawasan Dabo Lama Kabupaten Lingga.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan serta pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup terutama pada masyarakat, penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memeberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup kepada masyarakat setempat. Melalui penelitian ini dapat diharapkan dan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi peneliti yang mempunyai kesamaan permasalahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai analisis permasalahan permukiman kumuh di kawasan dabo lama kabupaten lingga. Selain itu juga untuk meningkatkan penalaran dalam bentuk pola piker yang dinamis serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh oleh penulis selama masa studi di Universitas Maritim Raja Ali Haji.

b) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Lingga dalam mengatasi permasalahan yang dialami pada masyarakat kawasan dabo lama dalam mengeluarkan kebijakan

c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai Analisis permasalahan permukiman kumuh di kawasan dabo lama kabupaten lingga.

